



Lebih Dekat dengan Pemangku Kepentingan Malioboro (1)

Level Lurah, Beban Kerja Setingkat Wali Kota

Sejak 2009, Pemkot Jogja mendirikan unit pelaksana teknis (UPT) untuk mengurus berbagai hal terkait Malioboro. Sebagai UPT, pejabatnya pun hanya eselon IV atau setingkat lurah. Tapi, tugasnya hampir sama dengan wali kota. Mengurusi berbagai bidang.

HERI SUSANTO, Jogja

SEBAGAI "etalase" dari Kota Jogja, kawasan Malioboro mendapat perhatian khusus dari Pemkot Jogja. Berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hampir selalu memiliki fokus pekerjaan di Malioboro. Makanya, tak salah ketika di masa kepemimpinan Herry Zudianto dibentuk UPT



untuk mengkoordinasi semua kepentingan pemkot di penggal jalan pertama dan utama tersebut.

Meski mengkoordinasikan, pejabat yang mengisi kepala hanya seorang "lurah". Tentu saja, lurah yang bakal memiliki kewenangan kerja layaknya wali kota khusus di penggal Malioboro tersebut merupakan lurah pilihan. Kepala UPT Malioboro saat ini, Syarif Teguh, adalah mantan lurah Suryatmajan. Dia sudah berpengalaman mengurus Malioboro lantaran banyak wilayah Suryatmajan yang masuk kawasan Malioboro.

Syarif berpendapat menjadi kepala UPT Malioboro memiliki beban tugas seperti wali kota. Banyak masalah yang harus dihadapi. Tugasnya memang hanya mengkoordinasikan semua kepentingan dari SKPD

PELAJARAN HIDUP: Kepala UPT Malioboro Syarif Teguh di depan kantornya kemarin (25/6).

di Pemkot Jogja. "Bagi saya, ini semua sebagai pengalaman baru. Ketika menangani Suryatmajan, masalah bisa dipetakan per penggal wilayah," tandas dia ditemui di kantornya kemarin (25/6).

Masalah di Malioboro tak seperti di tingkat kelurahan. Di Malioboro hampir semua masalah ada. Mulai persoalan kemanusiaan, hukum, sosial, budaya, dan tentu saja ekonomi. "Apalagi, sekarang ada pos pengaduan. Semua masalah yang menimpa pengunjung sering kali dikeluhkan di sini," tandasnya.

Terkait keberadaan pos pengaduan ini, Syarif mengaku kerap mendapati pengalaman menarik. Terutama saat musim liburan sekolah. Banyak pengunjung yang tertinggal rombongan dan kehabisan bekal. Oleh pedagang atau *stake holder* lain di Malioboro, mereka selalu disarankan ke pos pengaduan.

▶ Baca Level... Hal 11

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Tembusan Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	S...
UPT Malioboro		

Anggap Semua Pengunjung Adalah Saudara

■ LEVEL...

Sambungan dari hal 1

Ketika ada pengaduan di pos pengaduan, tak jarang UPT yang akhirnya mengambil tindakan. Biasanya mereka memulangkan rombongan tersebut. "Ya, akhirnya patungan dengan teman-teman untuk membelikan tiket kereta api. Kalau rombongan masih di sini, kami antarkan ke rombongan tersebut atau ke tempat menginapnya," tutur Syarif.

Pengunjung yang tertinggal rombongannya itu hanya satu dari beragam masalah yang kerap timbul di Malioboro. Ada pula pengaduan dari pengunjung yang kecopetan. Biasanya, petugas UPT aktif mengantarkan sang pengadu mengurus laporan ke kepolisian.

"Berkaitan dengan kebijakan, UPT ini seperti *cucuk lampah* dari pemkot. Harus bisa *momong* seluruh kepentingan," lanjut bapak dua anak ini.

Lulusan Sekolah Tinggi Pemerintah Dalam Negeri (STPDN) angkatan 2000 ini mengungkapkan, kepala UPT Malioboro bukan hanya harus bisa mengayomi seluruh kepentingan. Tugas kepala UPT juga harus bisa bertindak tegas. Terutama ketika menangani pelanggaran yang terjadi di jalan sepanjang sekitar 1,2 kilometer tersebut.

"Ternyata paguyuban-paguyuban lebih senang pelanggaran ditindak tegas. Sebab, mereka sendiri juga sudah sering mengingatkan. Tapi tetap saja pelanggaran seperti tidak ada matinya," aku Syarif.

Abdi negara yang pernah mengecap karir sebagai staf di Kelurahan Terban ini menambahkan, berbagai pengalaman hidup banyak dia rasakan selama berdinasi di Malioboro. Dia menuturkan penggal jalan yang dikenal di level dunia ini banyak mengajarkan nilai-nilai kehidupan.

"Malioboro bukan sekadar objek wisata. Di sini sebenarnya sama dengan jalan-jalan protokol lain. Ada ekonomi, pengunjung, dan juga kriminal," tandasnya.

Nilai kehidupan dari Malioboro yang paling berkesan di benak Syarif adalah soal menghargai perbedaan dengan orang lain. Di Malioboro pengunjung berbagai etnis dan ras hampir ada setiap hari. Otomstis, ba-

nyak persoalan yang muncul dan butuh penanganan cermat.

"Karena bermacam-macam itu, dulu sempat ada citra jika belanja di Malioboro pakai bahasa Jawa bisa lebih murah. Kalau tidak, pakai kendaraan yang berpelat AB (juga bisa memperoleh harga murah)," katanya.

Semakin meningkatnya kesadaran *stake holder* di Malioboro, kini perlakuan terhadap pengunjung mulai sama. Pemangku kepentingan tidak lagi membedakan bahasa atau asal kendaraan dalam menentukan harga.

Semua pengunjung dipandang sama. Semua pengunjung bahkan wajib dianggap seperti keluarga yang suatu saat bakal kembali berkunjung. "Pengunjung itu seperti saudara sendiri," jelasnya. (*/amd)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Mei 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005